**BAB 2. HUKUM-HUKUM UMUM DALAM AKAD (TRANSAKSI)**

Dalam dunia usaha, akad usaha itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang, dan karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Warisan ilmu fikih yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian-perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan beberapa kaidah dan pandangan bagi umat Islam untuk digunakan memenuhi kebutuhan modern kita. Tidak ada salahnya juga, kita menarik pelajaran dari berbagai pengalaman kalangan non Muslim. Kalangan barat telah biasa melakukan berbagai perjanjian usaha tersebut dengan baik, yakni dengan memberikan jaminan kepada masing-masing pihak terhadap hak-hak mereka, dengan rincian yang sangat jelas.

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang.

Seorang usahawan Muslim tertantang untuk memberikan perhatian terhadap persoalan akad tersebut, dalam menyusun konsep dan manajemennya dari awal, dan dalam menunaikan hak dan menjaga keuntungan usahanya itu hingga akhir masa akad. Ia lebih layak melakukan semua itu, karena ia membaca firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. “(Al-Maidah : 1).*

Oleh sebab itu, kepada usahawan Muslim, penulis sajikan beberapa hukum umum yang berkaitan dengan berbagai akad usaha dan keterampilan yang berkaitan dengannya, serta berbagai pilihan yang relevan dengan proposal rinci yang dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan usaha di kehidupan modern sekarang ini.

**DEFINISI AKAD (TRANSAKSI)**

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.[[1]](#footnote-0)

Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Di antaranya adalah Firman Allah,

*"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."\*

Jual beli dan sejenisnya adalah akad. Setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri baik berupa nadzar, sumpah dan sejenisnya, disebut juga sebagai akad.

**RUKUN-RUKUN AKAD**

**1. Dua Pihak atau Lebih yang Melakukan Akad**

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

***Pertama****,* kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

***Kedua****,* bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butch pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

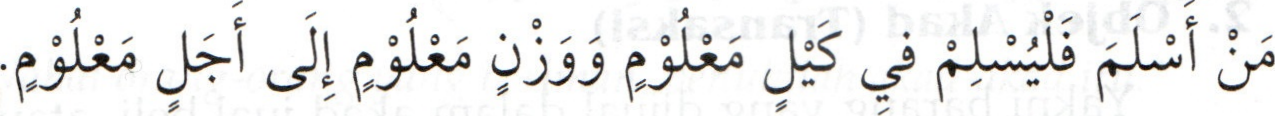
Kemudian ***ketiga,***akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyara tan), *khiyar arru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya. Nanti akan dijelaskan secara rinci.

**2. Objek Akad (Transaksi)**

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

\* Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati,* seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, boleh-boleh saja.

* Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan[[2]](#footnote-1) yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.
* Komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahterimakan. Karena yang demikian itu termasuk *gharar,* dan itu dilarang.
* Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.
* Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli *as-Salam,* di mana seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, berdasarkan sabda Nabi,



*"Barangsiapa yang melakukan jual beli as-Salam hendaknya is memesannya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas."*

Nanti akan dijelaskan secara rinci. Kepastian akad tersebut ditentukan oleh tidak adanya hal yang menyebabkan munculnya pilihan lain, seperti terlihatnya cacat barang dan sejenisnya.

**3. Lafazh *(Shighat)* Akad**

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung se- rah terima *(ijab-qabul).*

*Ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu, dan *qabul* (penerimaan) diungkapkan kemudian. Ini adalah madzhab Hanafiyah. Yang benar menurut mereka, *ijab* adalah yang diucapkan sebelum *qabul,* baik itu dari pihak pemilik barang atau pihak yang akan menjadi pemilik berikutnya.

*Ijab* menunjukkan penyerahan kepemilikan, sementara *qabul* menunjukkan penerimaan kepemilikan. Ini adalah madzhab mavoritas ulama. Maka yang benar menurut mereka bahwa *ijab* itu harus diungkapkan oleh pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon istri dan lain sebagainya. Dan yang benar menurut mereka, *qabul* itu berasal dari orang yang akan menjadi pemilik kedua dari barang tersebut, seperti pembeli, penyewa, calon suami dan lain sebagainya. Jadi pemilik pertama yang mengucapkan *ijab* sementara calon pemilik kedua yang mengucapkan *qabul.* Tidak ada perbedaan bagi mereka, siapa pun yang mengucapkan pertama kali dan siapa yang belakangan.

**APAKAH AKAD SUDAH DIANGGAP SAN DENGAN ADANYA SERAH TERIMA BARANG?**

Para ulama telah sepakat bahwa akad itu sudah dianggap sah dengan adanya pengucapan lafazh perjanjian tersebut. Namun mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu sah dengan sekedar adanya serah terima barang. Yakni seorang penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang bayarannya tanpa adanya ucapan dari salah seorang di antara mereka berdua. Kenyataan pada zaman modern sekarang ini, perangkat komputer bisa dijadikan etalase barang-barang jualan dengan urutan tertentu, lalu datang pembeli dan memilih barang mana yang disukainya, kemudian ia menyerahkan uang bayarannya di tempat yang sudah ditentukan. Si komputer akan menyerahkan kepadanya barang yang diinginkan dengan cara yang canggih pula. Dan pendapat yang benar menurut mayoritas ulama adalah bahwa jual beli semacam itu sah berdasarkan hal-hal berikut:

\* Hakikat dari jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak ada ketentuan syar'i tentang harusnya lafazh tertentu. sehingga semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan.

\* Tidak terbukti adanya syarat *ijab qabul* secara lisan dalam nash-nash syariat. Kalau itu merupakan syarat, pasti sudah ada nash yang menjelaskannya.

\* Umat manusia telah terbiasa melakukan jual beli di pasarpasar mereka dengan melakukan serah terima barang saja (tanpa pengucapan lafazh akad) di berbagai negeri dan tempat, tanpa pernah diingkari ajaran syariat, sehingga itu sudah menjadi *ijma'* (konsensus umat).

**Syarat-syarat Shighat Akad**

*Pertama;* harus berada dalam satu majelis. Karena *ijab* itu hanya bisa menjadi bagian dari akad bila ia bertemu langsung dengan *qabul.* Perlu dicatat, bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman, sehingga akad itu bisa berlangsung melalui pesawat telepon. Dalam kondisi demikian, lokasi tersebut adalah masa herlangsungnya percakapan telepon. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan line telepon masih tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam majelis akad. *Al-Majma' al-Fiqhi* pernah mendiskusikan persoalan melangsungkan akad usaha melalui media komunikasi modern. Akhirnya mereka menetapkan satu keputusan yang kami nukilkan teksnya sebagai berikut :

**Surat Keputusan No. (45/3/6)   
Melakukan Akad Usaha Melalui Media Komunikasi Modern**

1. Kalau akad usaha antara kedua belah pihak berlangsung sementara keduanya tidak berada dalam lokasi akad, masingmasing tidak melihat pihak lain dengan mata kepala sendiri, juga tidak mendengar suaranya, sementara media komunikasi yang menghubungkan antara keduanya adalah tulisan, surat, kedutaan atau delegasi, via telegram, surat kilat, faksimili, layar monitor komputer, dalam semua kondisi tersebut akad dianggap sah, kalau *dab* bisa sampai kepada pihak yang dituju, demikian juga qabu/dari pihak yang lain.
2. Kalau akad antara kedua belah pihak sudah berlangsung pada satu waktu sementara keduanya berada di dua lokasi yang berjauhan, akad itu dilakukan dengan telepon dan faksimili, maka akad antara dua pihak tersebut dianggap sebagai akad antara dua orang yang hadir. Pada kondisi demikian diterapkan hukum asal yang ditetapkan oleh para ulama ahli fikih yang tergabung dalam diskusi ini, tersebut dalam lampiran.
3. Kalau pihak yang menawarkan akad dengan media- media tersebut memberikan *dab* dengan waktu tertentu, maka harus dijaga konsekuensi pada masa tertentu tersebut, tidak boleh diralat kembali.
4. Semua kaidah-kaidah tersebut di atas tidak berlaku bagi akad nikah karena nikah mengharuskan adanya saksi, tidak juga berlaku untuk *sharf* (penukaran mata uang asing) karena ada syarat penyerahan langsung, juga tidak untuk jual beli *as- Salam[[3]](#footnote-2)* karena ada syarat pembayaran harus dibayar di muka.

(5) Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pemalsuan dan penggelapan atau kekeliruan, harus dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum untuk menetapkan perkara.

*Kedua;* hal yang menjadi penyebab terjadinya *ijab* harus tetap ada hingga terjadinya *qabul* dari pihak kedua yang ikut dalam akad. Kalau *ijab* itu ditarik oleh pihak pertama, lalu datang *qabul, itu* dianggap *qabul* tanpa *ijab,* dan itu tidak ada nilainya sama sekali.

*Ketiga;* tidak adanya hal yang menunjukkan penolakan atau pemunduran diri dari pihak kedua. Karena adanya hal itu membatalkan *ijab.* Kalau datang lagi penerimaan sesudah itu, sudah tidak ada gunanya lagi, karena tidak terkait lagi dengan *ijab* sebelumnya secara tegas sehingga akad bisa dilangsungkan.

**KLASIFlKASI AKAD**

Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Di sini akan kita singgung sebagian klasifikasi tersebut:

**Pertama: Dari Segi Hukum *Taklifi***

Berkaitan dengan akad ada beberapa hukum syariat yang ditetapkan. Berdasarkan sudut pandang ini, perjanjian terbagi menjadi lima:

**1. Akad wajib.** Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.

**2. Akad sunnah.** Seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunnahkan.

**3. Akad mubah.** Seperti akad jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Dan inilah dasar hukum dari setiap bentuk akad pemindahan kepemilikan, baik itu yang bersifat barang atau jasa.

**4. Akad makruh.** Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Dan inilah dasar hukum dari setiap bentuk akad yang diragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.

**5. Akad haram.** Yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.

**Kedua: Dari Segi Materi dan Non Materi**

Kalau ditinjau dari sudut sebagai harta atau bukan, akad terklasifikasikan menjadi tiga:

1. **Akad harta dari kedua belah pihak,** disebut sebagai perjanjian materi, seperti jual beli secara umum, jual beli *salam* dan sejenisnya. Demikian juga akad terhadap jasa, seperti penyewaan dan peminjaman barang. Karena jasa termasuk harta atau dijustifikasikan sebagai harta menurut mayoritas para ulama, berbeda dengan pendapat kalangan Hanafiyah.
2. **Akad non harta dari kedua belah pihak.** Yakni akad yang terjadi terhadap satu pekerjaan tertentu tanpa imbalan uang, seperti gencatan senjata antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir *harbi,* akad menanggung (anak yatim atau lainnya), wasiat dan sejenisnya.

**3. Akad harta dari satu pihak dan non harta dari pihak lain.** Seperti akad *khulu',* akad *jizyah,* akad pembebasan denda, dan sejenisnya.

Yang terkuat dari semua akad itu adalah akad non harta dari kedua belah pihak. Karena akad yang bersifat material bisa dibatalkan karena adanya cacat pada barang kompensasinya. Seperti transaksi uang dengan barang dagangan. Sementara akad non material hanya bisa dibatalkan bila terjadi hal yang mencegah berlangungnya akad tersebut.

**Ketiga: Dari segi Permanen atau Non Permanen**

Dilihat dari sudut permanen atau tidaknya, akad juga diklasifikasikan menjadi tiga:

1. **Akad permanen dari kedua belah pihak,** yakni akad yang terjadi di mana masing-masing dari kedua belah pihak tidak mampu membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan pihak lain. Seperti **akad** jual beli, *sharf, salam,* sewa-menyewa dan sejenisnya.

**2. Akad non permanen dari kedua belah pihak,** yakni bahwa salah satu dari kedua belah pihak bila menghendaki bisa membatalkan akad tersebut. Contohnya, *syarikah, wakalah,* peminjaman, **menanam** modal dengan sistem *qiradh,* wasiat dan sejenisnya.

3. Akad permanen dari salah satu pihak, namun non permanen pada pihak lain. Seperti penggadaian barang setelah barang di tangan, penjaminan dan sejenisnya.

Di antara hukum yang berlaku pada akad permanen adalah tidak ada pilihan *(khiyar)* yang bersifat selamanya, dan tidak ada pula pembatalan setelah kematian salah satu yang terlibat dalam akad atau keduanya, salah satu menjadi gila atau pingsan dan sejenisnya. Lain halnya dengan akad non permanen. Kalangan Hanafiyah berpendapat lain dalam soal penyewaan. Mereka menyatakan, "Penyewaan itu terbatalkan setelah kematian. Karena akad itu berlangsung pada fasilitas barang, dan fasilitas itu muncul sedikit demi sedikit. Fasilitas yang diambil setelah wafatnya pemilik barang tentu saja belum ada ketika terjadi akad. Maka dengan sendirinya dalam akad penyewaan, batas itu setelah kematian pemilik.

**Keempat: Dari Segi Syarat Penyerahan Barang Langsung atau Tidak**

Dilihat dari keharusan adanya penyerahan barang langsung atau tidak, akad terbagi menjadi dua:

1. Akad yang tidak mengharuskan serah terima barang secara langsung pada saat akad, seperti jual beli secara umum, *wakalah* (perwakilan), *hizvalah* (transfer) dan lain-lain.
2. Akad yang mengharuskan serah terima barang secara langsung. Dan akad-akad ini, terbagi pula menjadi beberapa macam:
3. Akad yang disyaratkan harus ada serah terima barang secara langsung untuk memindahkan kepemilikan, seperti hibah dan peminjaman uang. Dalam semua perjanjian ini kepemilikan tidak berpindah hanya berdasarkan akad, tetapi harus ada serah terima barang secara langsung, ini menurut mayoritas para ulama terkecuali kalangan Malikiyah.

b) Akad yang mensyaratkan serah terima barang secara langsung sebagai syarat sahnya, seperti *sharf (Money Changer),* jual beli *salam* dan penjualan komoditi yang ribawi. Dalam *sharf (Money Changer)* dan penjualan komoditi ribawi harus ada penyerahan barang langsung dan juga pembayarannya dalam satu waktu, kalau tidak, akad jual beli itu rusak. Namun dalam jual beli *as-Salam* harus didahulukan pembayaran harga modal dalam waktu akad, kalau tidak, jual beli itu juga rusak. Sebagian kalangan Malikiyah membolehkan penangguhan pembayaran harga modal itu hingga tiga hari. Karena sesuatu yang dekat dengan sesuatu, dianggap sama hukumnya dengan sesuatu tersebut.

c) Akad yang akan menjadi permanen adalah bila ada serah terima barang secara langsung, seperti hibah dan pegadaian, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa akad-akad itu tidak dianggap permanen dengan sekedar akad tersebut, tetapi dipersyaratkan serah terima barang untuk menjadikan akad tersebut permanen. Orang yang menghibahkan barangnya berhak untuk membatalkan hibahnya sebelum ada serah terima barang menurut mayoritas ulama. Namun sebagian ulama Malikiyah tidak berpendapat demikian. Demikian juga penggadaian itu dianggap batal menurut mayoritas ulama bila orang yang menggadai barang menggagalkannya sebelum diterimanya barang oleh pihak yang menerima gadaian, dan demikian seterusnya.

**Kelima: Dari Sudut Pandang Ada dan Tidak Adanya Kompensasinya atau Tidak**

Berkaitan dengan ada atau tidak adanya kompensasi, akad terbagi menjadi dua:

1. Akad dengan kompensasi, seperti jual beli, *syarikah,* penyewaan, pernikahan dan sejenisnya.
2. Akad sukarela, seperti hibah, penitipan, sponsorship dan sejenisnya.

Pengaruh dari klasifikasi ini adalah sebagai berikut:

*a.* Adanya syarat untuk harus mengetahui bentuk kompen-   
*sasi* dalam berbagai akad dengan kompensasi. Komoditi berharga,   
uang pembayaran, upah dan sejenisnya. Dalam semua perjanjian   
tersebut kompensasi-kompensasi itu harus diketahui, kecuali dalam   
soal mahar atau kompensasi *khulu'.* Ketidaktahuan soal mahar atau   
kompensasi *khulu'* tidak membatalkan akad. Karena ada barome-   
ter-nva, yaitu mahar standar. Adapun akad sukarela, karena memang ti**dak** membutuhkan kompensasi, tidak mengapa bila ada ketidak-   
jelasan kompensasinya bila hendak diberikan, atau ada sedikit ketidakjelasan barang, karena semua itu didasari oleh kemudahan dan tanpa batasan.

b. Wajibnya menunaikan apa yang menjadi perjanjian kedua belah pihak yang terikat, dalam perjanjian dengan kompensasi, berdasarkan Firman Allah

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."* (Al- Maidah: 1).

Karena dengan tidak ditunaikannya perjanjian itu pasti akan terjadi kerugian pada pihak lain yang terikat, yakni hilangnya secara sia-sia segala kompensasi yang dia berikan sebagai imbalannya. Lain halnya dengan akad sukarela di mana pemberian kompensasi itu hanya dianjurkan, tidak diwajibkan. Karena orang yang melakukan akad tersebut hanya berbuat baik. Orang yang sekedar melakukan amal kebajikan, tentu tidak diwajibkan dituntut kompensasi apa-apa.

**Keenam: Dari Sudut Sah dan Batilnya**

Dipandang dari sah dan batilnya, akad terbagi menjadi dua:

1. **Akad yang sah.** Yakni akad yang secara mendasar dan aplikatif memang disyariatkan. Akad yang memenuhi rukun-rukunnya dan aplikasinya secara bersamaan. Sehingga berlaku seluruh konsekuensi akad yang sah, seperti jual beli, sewa menyewa dan sejenisnya, apabila seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sudah terpenuhi.

**2. Akad ilegal atau akad yang batal.** Yakni akad yang dianggap ajaran syariat tidak diberlakukan padanya segala konsekuensi akad yang sah. Batasannya adalah segala akad yang pada asalnya dan secara aplikatifnya tidak disyariatkan, seperti akad orang gila, anak kecil yang belum baligh, atau akad usaha terhadap barang yang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya. Atau akad yang secara asal disyariatkan, tetapi secara aplikatif tidak disyariatkan, seperti akad dengan orang di bawah paksaan, akad untuk barang yang tidak diketahui dalam akad dengan kompensasi.

Kalangan Hanafiyah membedakan antara akad yang secara asal dan secara aplikatif tidak disyariatkan, dan itu mereka sebut akad batil, dengan perjanjian yang secara asal disyariatkan namun secara aplikatifnya tidak, dan itu mereka sebut sebagai akad yang rusak. Berdasarkan pembedaan ini, terbentuk beberapa hasil praktis berkaitan dengan adanya konsekuensi terhadap akad rusak atau batil alias ilegal. Di antara konsekuensi tersebut menurut kalangan al-Hanafiyah adalah sebagai berikut:

* Berpindahnya kepemilikan dalam akad rusak dengan serah terima barang bila direlakan oleh penjual. Si pembeli boleh secara bebas mengoperasikan barang tersebut dengan menghibahkannya, menyedekahkannya dan sejenisnya, kecuali menggunakannya. Pemindahan kepemilikan tersebut tentunya dengan kompensasi harta yang sama, bukan dengan pelafazhan harga tertentu saja.
* Bagi penjual, keuntungan dari akad penjualan rusak tersebut tetap baik adanya, lain halnya dengan pembeli. Alasan pembedaan itu menurut para ulama bahwa uang itu tidak bisa ditentukan dengan pembatasan nilai melalui pelafazhan saja, sehingga tidak mungkin dinyatakan jelek, lain halnya dengan barang.
* Akad jual beli yang rusak itu masih bisa diperbaiki, kalau kerusakannya dianggap ringan, yakni bila tidak menyentuh inti akad, seperti ketidaktahuan batas waktu pembayaran dalam soal *khiyar* (waktu tenggang menentukan transaksi), dalam harga dan sejenisnya. Adapun apabila kerusakan itu berat, yakni yang sudah menyentuh inti akad, seperti dalam hal barang yang akan dijadikan objek akad atau kompensasi dari barang tersebut, karena semua itu tidak bisa menerima perbaikan menurut kesepakatan para ulama.

Adanya *khiyar* dalam sebuah akad rusak sama halnya dengan adanya pada sebuah akad normal. Baik perjanjian yang menggunakan hak pilih menentukan persyaratan atau hak pilih untuk tidak mengambil barang karena cacat.

**KOMPETENSI**

De**finisi Kompetensi**

Kompetensi (yang dalam bahasa Arab adalah Al-Ahliyah), dari segi bahasa adalah kelayakan (ash-sholahiyah).

Dan dalam istilah syar'i ialah: Kelayakan seseorang (individu) untuk mewajibkan dan melaksanakan kewajiban. Atau (dengan bahasa lain): Kapabilitas individu yang menjadi sandaran tegaknya hak-hak yang disyariatkan yang wajib dia dapatkan (hak) atau yang menjadi tanggung jawab wajib atasnya (kewajiban).

**Klasifikasi Kompetensi**

Kompetensi atau kelayakan terbagi menjadi dua: *pertama,* kompetensi (kelayakan) yang wajib didapatkan seseorang, dan *kedua,* kompetensi dalam melaksanakan (tanggung jawab); dan masingmasing dari kedua ini mungkin sempurna dan mungkin kurang, maka (berdasarkan kemungkinan ini, kompetensi) menjadi empat ka tegori:

**Kompetensi (Kelayakan) Wajib yang Penuh**

Ialah kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak wajib untuk dirinya, dan tetapnya kewajiban-kewajiban atasnya. Kelayakan ini telah ada dan tetap pada diri seseorang sejak is lahir sampai meninggal dunia, dan setiap manusia memikul kewajiban-kewajiban sesuai dengan kompetensi umur dan daya akalnya. Maka yang wajib dia lakukan adalah hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah, yang sesuai dengan tabiatnya, kesanggupannya, pemahamannya, akalnya dan karakter dari hak-hak itu sendiri. Sehingga apabila dia telah mencapai umur baligh dan berakal, telah sempurna kompetensinya untuk menerima hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban.

**Kompetensi (Kelayakan) Wajib yang Tidak Penuh**

Ialah kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak wajib saja. Artinya, tanpa harus mengemban suatu kewajiban apa pun, dan kelayakan ini *tsabit* (tetap) bagi janin (dalam perut ibunya), di mana dimulai sejak dia masih berupa segumpal darah sampai dia lahir. Janin dalam tahapan ini memiliki perjanjian yang membenarkan bahwa dia berhak mendapatkan hak-hak, seperti: memerdekakan, mendapat warisan, mendapat wasiat, dan nasab, akan tetapi dia sama sekali tidak menanggung kewajiban apa pun. Dan *illat* (sandaran) kelayakan yang wajib, yang penuh dan kurang (yang didapatkannya), adalah perjanjian(nya) dengan Allah ketika masih menjadi janin.

**Kompetensi (kelayakan) Pelaksanaan Penuh**

Kompetensi pelaksanaan yang penuh adalah kompetensi dalam berinteraksi dan bertindak. Lni adalah kelayakan seseorang karena lahirnya tindakan-tindakan pekerjaan sebagaimana bentuk yang dituntut darinya secara syar'i, yang bersandarkan kepada dava akal dan jasmaniah, dan itu bisa terwujud dengan kesadaran yang baik; yaitu baligh, berakal sehat, dan tidak ada penghalang. Dan kompetensi inilah yang merupakan sandaran dibebankannya hukum syari'i pada seseorang *(Manath at-Taklif).*

**Kompetensi (kelayakan) Pelaksanaan Tidak Penuh**

Ialah kelayakan seseorang untuk melakukan sebagian perbuatan dan tindakan, dan meninggalkan sebagian yang lain. Sandaran kompetensi ini adalah *tamyiz* (berumur cukup tetapi belum mencapai baligh) dan itu berlangsung sampai umur baligh; dan mayoritas ulama berpendapat bahwa umur anak yang *mumayyiz* adalah sekitar tujuh tahun. Ini berdasarkan sabda Nabi

*"Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat bila mencapai umur tujuh tahun.[[4]](#footnote-3)*

Kalau seandainya mereka belum *mumayyiz* dalam umur tujuh tahun ini, niscya tidak akan ada faidahnya memerintahkan. Maka anak-anak (seumur itu) boleh melakukan ibadah-ibadah secara langsung dan itu sah bagi mereka, akan tetapi tidak wajib atas mereka, sebagaimana sah juga baginya untuk secara langsung bertindak, seperti bertransaksi jual beli, tetapi dalam pengawasan walinya.

Setiap anak yang sudah berakal sehat memiliki kompetensi melakukan kewajiban. Karena barometer dari kompetensi ini adalah daya nalar. Kompetensi ini bisa kurang dan bisa optimal, sesuai dengan kadar kemampuan akal seseorang.

Kompetensi optimal itu Baru bisa dimiliki oleh orang yang sudah akil baligh dan sehat mental, yang juga tidak tercekal karena satu sebab.

Sementara kompetensi non optimal dalam melaksanakan kewajiban bisa dimiliki anak yang sudah berakal sehat, meski daya nalarnya belum sempurna. Termasuk anak kecil yang sudah berakal sehat, atau orang bodoh yang masih berakal. Orang yang bodoh sekali yang tidak mampu mengoperasikan harta mereka dengan baik, ditambah lagi dengan orang yang linglung misalnya, semuanya adalah orang-orang yang berkompetensi tidak optimal. Meskipun mereka memiliki dasar kemampuan nalar, tetapi mereka tidak memiliki (Jaya nalar yang normal dan tidak memiliki kemampuan mengatur segala sesuatu.

**Berbagai Terminologi yang Berkaitan dengan Kompetensi**

1. *Dzimmah* **(Kehormatan Dasar)**

*Dzimmah,* secara bahasa kata *dzirnmah* dalam bahasa Arab artinya adalah (perjanjian). Secara terminologis artinya adalah satu karakter pada diri seseorang yang menyebabkan dirinya berkemampuan untuk membebani atau terbenani hukum yang dibangun berdasarkan perjanjian yang terjadi antara Allah dengan para hambaNya ketika masih berada dalam perut ibunya.

Kehormatan asasi ini juga yang menjadi barometer tanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hak ini sudah ada pada diri manusia semenjak ia masih berupa janin di perut ibunya hingga ia berjumpa dengan Allah.

1. **Akal**

Adalah sifat yang membuat seseorang layak (mampu) memahami pembicaraan.

Perbedaan antara akal dengan kehormatan dasar adalah bahwa kehormatan dasar manusia hanya menjadikan dirinya berkemampuan membebani dan dibebani hukum. Sementara akal membuat manusia mampu memahami ucapan.

Kalau kehormatan dasar manusia saja sudah menciptakan kelayakan bagi dirinya untuk melaksanakan kewajiban, maka akal menjadi barometer kelayakan dalam menyempurnakan pelaksanaan kewajiban. Kompetensi ini memungkinkan dirinya untuk memahami ucapan. Itulah arti bahwa akal menjadi syarat dari kelayakan melaksanakan kewajiban. Sehingga terlaksananya kewajiban itu amat tergantung kemampuan akal.

1. *Taklif* **(pembebanan hukum)**

Arti *taklif* secara bahasa adalah perintah melakukan hal yang berat. Secara terminologis dalam ilmu fikih, artinya adalah pembebanan hal yang merupakan tugas. Bisa juga dikatakan, ucapan yang mengandung perintah dan larangan.

Barometer dari munculnya *at-Taklif* adalah kondisi akal sehat dan baligh. Kalau seseorang sudah berakal sehat dan baligh, ia sudah berhak mendapatkan beban *taklif.* Tidak dipersyaratkan ia harus mencapai masa baligh sempurna seperti halnya persyaratan dalam kelayakan penuh dalam melaksanakan kewajiban. Barangsiapa yang sudah mimpi basah dan ia sudah memiliki dasar kemampuan nalar vang bisa digunakan memahami ucapan, berarti ia sudah mencapai batas mendapatkan pembebanan hukum, meskipun ia memiliki semacam kebodohan atau kurang cakap menggunakan uang.

1. *Al-Wilayah* **(Kekuasaan Syar'i)**

*Al-Wilayah* adalah kekuasaan secara syar'i terhadap diri sendiri a tau terhadap harta yang membawa konsekuensi terlaksananya tindakan sesuai ketentuan syariat pula. Syarat adanya kekuasaan ini tidak diragukan lagi adalah kelayakan (kompetensi) menjalankan kewajiban.

Perbedaan antara kelayakan sendiri dengan kekuasaan syar'i atas diri sendiri adalah bahwa kompetensi tersebut lebih terorientasikan kepada kelayakan secara khusus, yang dengan kelayakan itu segala perjanjian dan aktivitas bisa dilaksanakan. Sementara *alWilayah* atau kekuasaan syar'i itu sendiri yang memungkinkan orang yang berakad menjalankan perjanjiannya, serta menetapkan segala konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Faktor munculnya kekuasaan syar'i itu sendiri ada tiga:

**Pertama,** dasar landasan. Yakni bahwa secara mendasar ia memang orang yang berhak melakukan perjanjian tersebut, ia adalah pemilik perjanjian. Itu terjadi karena adanya kompetensi optimal dalam menjalankan kewajiban, sehingga ia bisa mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

**Kedua,** kekuasaan syar'i terhadap orang lain. Seperti kekuasaan seorang ayah atau kakek terhadap anak atau cucunya yang masih kecil atau kurang nalarnya. Atau kekuasaan orang yang diwasiati oleh bapak atau kakek terhadap anak asuhannya, atau kekuasaan seorang hakim terhadap mereka semua.

**Ketiga,** surat kuasa dari pihak yang berhak.

Kalau ketiga hal ini tidak ada, maka hilanglah kekuasaan syar'i tersebut, sehingga yang kita hadapi adalah sebuah aktivitas *fudhuli* (tak berarti). Aktivitas *fudhuli* adalah segala aktivitas yang sebenarnya syar'i akan tetapi tidak memiliki landasan kekuasaan syar'i yang mendukungnya. Seperti orang yang menjual barang yang bukan miliknya, tanpa ada surat kuasa atau izin resmi dari pemiliknya. Asal hukum dari aktivitas fudhuli semacam itu adalah tergantung pada izin resmi dari orang yang memiliki kekuasaan.

**Kapan Seseorang Memiliki Kompetensi Penuh Pada Diri Seseorang Berkaitan dengan Kegiatan Finansial?**

Kompetensi itu dimiliki seseorang yang telah mengalami mimpi basah dan telah baligh secara sempurna, berdasarkan Firman Allah

*"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya."* (An-Nisa': 6).

Kalau kedua hal itu tidak semuanya dimiliki, seorang anak belum bisa diberikan hak hartanya. Bahkan sebagian ulama Salaf menyatakan, "Bisa jadi seseorang sudah bergelanhmgan jenggotnya, tetapi belum juga mencapai masa berkemampuan." Artinya, anak vatim itu belum bisa diserahi hartanya meskipun ia sudah tua renta, elama belum mencapai masa berkemampuan *(rusyd).*

Bahkan berbagai undang-undang positif buatan manusia telah menjadikan masa baligh sempurna itu sebagai barometer kompetensi penuh bagi seseorang. Meskipun mereka menetapkannya pada usia dua puluh satu tahun. Sementara ajaran syariat tidak menetapkan umur tertentu untuk masa berkemampuan, karena kondisi seseorang itu berbeda sate dengan yang lain.

**Hukum** **Kegiatan Finansial yang Dilakukan Oleh Anak Kecil yang Sudah *Mumayylz***

Kegiatan finansial semacam itu terbagi menjadi tiga:

**Pertama,** yang hanya mengandung hal-hal bermanfaat semata. Dalam hal ini, kegiatan tersebut sah. Seorang anak kecil boleh menerima hibah dan sejenisnya, asal tidak membahayakan dirinya. Meskipun itu tanpa izin walinya sekalipun.

**Kedua,** kegiatan finansial yang hanya berisi hal-hal yang membahayakan. Berdasarkan kesepakatan ulama, kegiatan ini tidak sah dilakukan oleh anak kecil, meskipun diizinkan oleh walinya. Seperti memberikan hibah, meminjamkan uang dan sejenisnya, intinya yang bersifat membelanjakan harta yang berada dalam genggamannya.

**Ketiga,** yang terkadang berguna dan terkadang berbahaya. Seperti jual beli dan sejenisnya. Keduanya berguna, misalnya ketika membeli, si anak kecil dapat memiliki barang. Dan ia mendapatkan keuntungan ketika ia menjual sesuatu. Namun kedua kegiatan tersebut merugikannya karena bersifat membelanjakan harta yang ber**ada** dalam genggamannya.

Hukum kegiatan semacam ini tergantung pendapat wali si **anak.** Kalau si wali mengizinkan, kegiatan itu sah. Tetapi kalau tidak, maka tidak sah.

**Kompetensi (Kelayakan) Seorang Wanita**

Dalam kompetensi, seorang lelaki dan wanita sama saja. Hakhak yang ditetapkan bagi seorang wanita sama dengan yang dite tapkan bagi seorang lelaki. Kewajiban bagi seorang wanita juga sama dengan kewajiban bagi laki-laki. Hal ini sudah merupakan paket yang paten secara umum, tidak ada yang diperdebatkan kecuali dua hal:

Pertama, kelayakan wanita untuk menerima akad nikah. Larangan terhadap tugas sebagai wali nikah telah dijelaskan oleh mayoritas ulama, dan itulah pendapat yang benar. Namun Abu Hanifah membolehkannya. Memang persoalannya merupakan kasus populer yang diperdebatkan. Namun semua ulama sepakat bahwa seorang wanita memiliki kebebasan memilih. Seorang wali tidak boleh memaksanya menikah dengan orang yang tidak disukainya.

Kedua, kelayakan wanita untuk berinfak dari hartanya lebih dari sepertiga jumlah hartanya tanpa izin suaminya. Mayoritas ulama memang membolehkannya, namun Imam Malik melarangnya.

Selain dalam dua persoalan ini, wanita dan laki-laki memiliki kompetensi yang sama.

**Penghalang Kompetensi (Kelayakan)**

Telah disinggung bahwa kelayakan menunaikan (kewajiban) *illat* (sandaran) hukumnya adalah pada predikat: baligh dan akal sehat yang dimiliki seseorang. Maka bila seseorang telah baligh dan berakal sehat, maka kelayakan dirinya (untuk memikul kewajiban dan mendapatkan hak) telah sempurna, sehingga dia memikul tanggung jawab atas semua tindakan dan apa yang dilakukannya. Akan tetapi kelayakan ini kadang terhalang oleh apa-apa yang dapat mempengaruhinya, sehingga menghalangi segala hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Apa saja penghalang-penghalang tersebut? Dan apa pengaruhnya terhadap hukum?

**Definisi Penghalang Kompetensi (Kelayakan)**

Penghalang di sini, dalam bahasa Arabnya adalah Aridhun atau Arddhathun yang bentuk jamaknya adalah Dari segi bahasa, apabila dari benda-benda, maka maknanya adalah lawan dari yang bentuk asli, Sedangkan apabila dari kejadian, maka dia adalah la- wan dari yang tetap. Dikatakan, Fulan terhalang oleh suatu masalah, maknanya adalah muncul masalah tersebut yang mencegahnya meneruskan apa yang dia lakukan.

Dan dalam terminologi, ialah apa yang muncul pada seseorang yang dapat menghilangkan (predikat) kelayakan (yang disandang)nya, atau menguranginya, atau merubah sebagian hukum yang berkaitan dengannya.

**Klasifikasi Penghalang Kelayakan**

Penghalang-penghalang kelayakan itu terbagi menjadi dua:

**Pertama,** penghalang-penghalang samawi (berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah). Penghalang yang tidak ada campurtangan bagi manusia untuk mengadakannya, seperti kondisi gila, pingsan, linglung, tidur, sakit dan mati.

**Kedua,** kendala-kendala yang diusahakan manusia. Artinya, manusia-memiliki campur tangan mewujudkannya, seperti mabuk, ketidaktahuan dan hutang.

Gila adalah kerusakan otak yang timbul karena depresi. Gila dapat melenyapkan kompetensi seseorang di tengah is melakukan tugasnya, sehingga segala aktivitas yang dilakukan olehnya bisa batal dan menjadi sia-sia, tidak berbekas sama sekali. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan soal kewajiban zakat pada hartanya, kewajibannya menanggung barang yang dirusaknya. Semua itu bukan termasuk dalam *taklif,* tetapi termasuk dalam perkara sebab akibat, dan pertanggungjawabannya dialamatkan kepada orang yang menjadi walinya.

Idiot, maksudnya adalah kelemahan dalam daya nalar karena lemahnya kesadaran dan daya tangkap. Penyakit ini tidak menghilangkan kompetensi secara keseluruhan, tetapi jelas menguranginya. Segala aktivitas orang yang idiot ini disamakan dengan aktivitas anak kecil yang sudah *mumayyiz.* Selama aktivitas itu memang bermanfaat semata, hukumnya sah. Kalau berbahaya, dianggap batal. Bila terkadang bermanfaat dan terkadang juga berbahaya, hukumnya tergantung izin dari walinya.

Sementara itu tidur dan pingsan dapat menghilangkan kompetensi melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Karena barometer kompetensi adalah akal. Sementara tidur menghilangkan akal dan mencegah kemampuan memilih. Akan tetapi pingsan dan ti dur tidak menghilangkan tanggung jawab merusak barang. Karena sebagaimana telah dijelaskan, itu tidak termasuk dalam persoalan *taklif,* namun berkaitan dengan hubungan sebab akibat yang konsekuensinya harus ditanggung.

Adapun mabuk, mayoritas ulama berpendapat bahwa mabuk yang diharamkan itu tidak menggugurkan pembebanan hukum, dan tidak juga menggugurkan kompetensi pelaksanaan amal. Semua aktivitas orang mabuk adalah sah dan berlaku. Namun kalangan Malikiyah berpendapat lain, dalam riwayat yang populer dari mereka. Demikian juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka menganggap seluruh aktivitas orang mabuk itu batal, dalam kondisi apa pun, menggugurkan pembebanan hukum dan menghilangkan kompetensi melakukan amal.

Adapun ketidakmampuan, yakni lawan dari kemampuan, ialah yang menyebabkan seseorang membelanjakan harta dan menghamburkannya tanpa aturan. Segala aktivitas orang pandir semacam itu disamakan hukumnya dengan perbuatan anak kecil yang *mumayyiz.* Bila memiliki kemungkinan bermanfaat dan berbahaya, dikembalikan kepada pendapat walinya. Kalau is mengizinkan, hukumnya sah dan berlaku. Bila tidak, ya tidak.

**Yang Dijadikan Barometer dalam Akad (Transaksi) adalah Tujuan dan Pengertian, Bukan Lafazh dan Zahir Ucapan**

Kalau transaksi bisnis berlangsung, yang dilihat blikanlah lafazh transaksi yang diucapkan oleh kedua pihak yang melakukan akad. Namun harus dilihat tujuan mereka yang sesungguhnya dari semua ucapan mereka. Karena yang menjadi tujuan adalah pengertian lafazh, bukan zahirnya saja. Karena lafazh itu hanya merupakan delegasi dari pengertiannya. Yang menjadi barometer adalah pengertiannya, bukan lafazhnya.

Kalau ada seseorang berkata, "Silahkan putar modal ini dan keuntungannya seluruhnya untuk Anda," berarti uang itu dijadikan sebagai pinjaman, meskipun ungkapannya adalah investasi modal. Demikian juga penjaminan dengan persyaratan bebasnya orang yang memindahkan, maka itu adalah *hiwalah* pada hakikatnya, meskipun diungkapkan dengan istilah penjaminan. Demikian seterusnya.

Ibnul Qayyim menandaskan, "Sesungguhnya tujuan adalahruh dari sebuah transaksi, yang dapat menyebabkan sah tidaknya transaksi tersebut. Sorotan terhadap tujuan dalam transaksi itu le:ih tepat daripada orientasi terhadap lafazh transaksi saja. Karena ..ifazh itu diucapkan untuk mewakili hal lain. Tujuan dari transaksi itulah yang menjadi sasaran dari lafazh tersebut. Dengan demikian, dapat dimaklumi bahwa barometer dari sebuah transaksi adalah hakikat tujuannya, bukan sekedar zahir lafazh yang diucapkan, atau aktivitas yang dilakukan."[[5]](#footnote-4)

**BEBERAPA MACAM HAK PILIH DALAM AKAD (TRANSAKSI) Definisi *khiyar* (Hak Pilih)**

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.

Secara terminologis dalam ilmu fikih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.

Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.

**Macam-macam Hak Pilih**

1. **Hak Pilih di Tempat Akad** *(Khiyar al-Majelis)*

Yakni semacam hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkannya se- lama belum beranjak dari lokasi perjanjian. Dasarnya adalah sabda Rasulullah

"Penjual dan pembeli memiliki kebebasan memilih selama mereka belum beranjak dari lokasi transaksi."[[6]](#footnote-5)

Arti beranjak di sini adalah luas, dikembalikan kepada kebiasaan

**2. Hak Pilih berdasarkan Syarat (Khiyar asy-Syarth)**

Yakni persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihakpihak yang terkait dalam perjanjian, atau diminta masing-masing pihak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain, untuk diberikan hak menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.

Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadits Habban bin Munqidz. Ia sering kali tertipu dalam jual beli karena ketidakjelasan barang jualan, maka Nabi memberikan kepadanya hak pilih. Beliau bersabda,

"Kalau engkau membeli sesuatu, katakanlah, 'Tidak ada penipuan'.[[7]](#footnote-6)

Dari sisi lain, terkadang memang amat dibutuhkan adanya hak pilih semacam ini, ketika pengalaman bemiaga kurang dan perlu bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masa tenggang memutuskan pilihan tersebut. Ada di antara ulama yang membatasi hanya tiga hari saja. Ada juga yang menyatakan boleh lebih dari itu, tergantung kebutuhan.

Hak pilih ini juga bisa dimiliki oleh selain pihak-pihak yang sedang terikat dalam perjanjian menurut mayoritas ulama demi merealisasikan hikmah yang sama dari disyariatkannya persyaratan hak pilih bagi pihak-pihak yang terikat tersebut. Pendapat ini ditentang oleh Zufar dan Imam asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau. Namun pendapat mayoritas ulama dalam persoalan ini lebih tepat.

Hak pilih persyaratan masuk dalam berbagai perjanjian permanen yang bisa dibatalkan. Nikah, thalaq,dan sejenisnya tidak menerima hak pilih yang satu ini, karena semua akad tersebut secara asal tidak bisa dibatalkan.

3. **Hak Pilih Melihat** *(Khiyar ar-Ru'yah)*

Maksudnya adalah hak orang yang terikat perjanjian usaha yang belum melihat barang yang dijadikan objek perjanjian untuk menggagalkan perjanjian itu bila is melihatnya (dan tidak berkenan).

Untuk keabsahan hak pilih ini, dipersyaratkan dua hal:

**Pertama,** Yang menjadi objek perjanjian hendaknya merupakan benda tertentu, seperti rumah, mobil dan sejenisnya. **Kedua,** hendaknya benda itu memang belum dilihat saat akad.

Hak pilih melihat ini memang masih diperselisihkan oleh para ulama berdasarkan perselisihan mereka terhadap boleh tidaknya menjual barang-barang yang tidak terlihat wujudnya. Sebagian ulama membolehkannya. Ada juga yang justru melarangnya secara mutlak. Sebagian ulama ada yang membolehkan dengan satu persyaratan, dan bila tanpa persyaratan itu mereka melarangnya. Nanti akan diulas secara rinci dalam pembahasan tentang jual beli "kucing dalam karung", *Insya Allah.*

**4. Hak Pilih Karena Cacat Barang** *(Khiyar Aib)*

Hak pilih ini dimiliki oleh masing-masing pihak yang terikat perjanjian untuk menggagalkan perjanjian tersebut bila tersingkap adanya cacat pada objek perjanjian yang sebelumnya tidak diketahui.

Hikmah disyariatkannya hak pilih ini sangat jelas sekali. Karena kerelaan pada berlangsungnya perjanjian usaha juga didasari keberadaan objek perjanjian yang tidak ada cacatnya. Adanya cacat yang tersingkap menunjukkan rusaknya kerelaan tersebut. Oleh sebab itu disyariatkan hak pilih terhadap cacat, sehingga bisa mengantisipasi adanya cacat yang menghilangkan kerelaan.

Cacat yang bisa ditolak dengan hak pilih ini adalah cacat yang bisa mengurangi harga barang di kalangan para pedagang. Yang menjadi barometer di sini tentu saja orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan barang tersebut. Juga dipersyaratkan bahwa cacat itu sudah ada sebelum serah terima, dan hendaknya orang yang melakukan perjanjian tidak mengetahui cacat itu. Persyaratan ini sudah dapat dimaklumi secara aksiomatik.

Hak pilih terhadap cacat ini memberikan hak kepada orang yang terikat perjanjian untuk melanjutkan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Yakni apabila pembatalan perjanjian itu memungkinkan. Tetapi kalau perjanjian itu tidak mungkin dibatalkan karena objek perjanjian bertambah atau berkurang sebelum diketahui cacatnya, pihak yang dirugikan hanya berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, yakni dengan menerima sejumlah uang sesuai dengan pengurangan harga karena adanya cacat tersebut.

Tetapi kalau orang tersebut sudah rela dengan adanya aib itu secara terus terang atau ada indikasi ke arah hal itu, maka hak pilih itu gugur dengan sendirinya.

**5. Hak Pilih Menentukan Objek Perjanjian Usaha**

Artinya, hak bagi pembeli atau penjual untuk memilih dengan konsekuensi persyaratan dalam perjanjian usaha yang akan dilakukannya, untuk menentukan satu dari dua atau tiga objek yang sama nilai atau harganya. Perjanjian itu berlaku pada salah satu dari dua atau tiga objek itu saja, dan salah satu dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut berhak memilihnya.

Hak ini masih diperdebatkan juga oleh para ulama. Mayoritas ulama melarangnya, karena ketidakjelasan objek perjanjian, sehingga ibarat 'menjual kucing dalam karung' yang itu jelas merusak perjanjian tersebut. Abu Hanifah membolehkan sistem ini dalam keadaan mendesak atau karena sudah menjadi kebiasaan, dengan catatan bahwa ketidakjelasan objek perjanjian itu tidak menyebabkan terjadinya pertikaian.

Keabsahan hak pilih ini bagi yang membenarkannya, membutuhkan tiga syarat:

\* Pilihan itu hendaknya terhadap tiga macam objek atau kurang, karena itu yang menjadi kebutuhan. Bila lebih dari itu, jelas tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada alasan untuk melakukannya.

* Adanya perbedaan antara ketiga objek tersebut dengan penjelasan harga masing-masing barang. Adanya perbedaan itu untuk menepis adanya ketidakseriusan dalam memilih. Sementara penjelasan harga itu untuk menepis ketidakjelasan objek yang menimbulkan perselisihan.
* Pembatasan waktu. Abu Hanifah memberi persyaratan agar tidak lebih dari tiga hari, dianalogikan dengan hak pilih persyaratan. Namun kedua sahabat beliau lebih memilih semata-mata dibatasi waktunya saja, meskipun lebih dari tiga hari.

Mereka yang membolehkan hak pilih ini juga berbeda panda- pat, apakah dalam hak pilih ini juga dipersyaratkan adanya *khiyar syarth?* Yakni dengan cara salah satu yang terikat perjanjian menetapkan syarat bagi dirinya untuk bisa menetapkan batasan waktu, dan hendaknya ia diberikan hak membatalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu, sehingga ia diberi pilihan antara memilih objek atau membatalkan. Atau tidak ada persyaratan demikian? Sehingga ia hanya memiliki kesempatan memilih atau menetapkan batasan waktu saja, namun tidak berhak menolak seluruhnya? Sedangkan mayoritas dalam madzhab ini mereka memilih pendapat terakhir ini.

**CACAT DALAM AKAD**

Ketika melakukan suatu akad terkadang akad tersebut itu diselimuti beberapa cacat yang bisa menghilangkan kerelaan sebagian pihak, atau menjadikan perjanjian itu tidak memiliki sandaran ilmu yang benar. Maka pada saat itu pihak yang dirugikan berhak membatalkan akad. Bentuk-bentuk cacat itu dapat digambarkan pada hal-hal (pemaksaan) berikut:

**Pertama: Intimidasi**

Yakni, mengintimidasi pihak lain untuk melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman.

* Intimidasi itu berlaku sebagai cacat dengan hal-hal berikut:
* Pihak yang mengintimidasi mampu melaksanakan ancamannya.
* Orang yang diintimidasi memiliki perkiraan kuat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
* Kalau salah satu dari dua hal ini apalagi kedua-duanya tidak ada, maka intimidasi itu dianggap main-main, tidak berpengaruh sama sekali.

Intimidasi itu sendiri ada dua macam: Intimidasi fungsional dan non fungsional.

Intimidasi fungsional adalah intimidasi yang dapat merusak kerelaan dan hak pilih. Dalam hal ini, pihak yang diintimidasi menjadi bagaikan alat di tangan intimidator. Intimidasi ini biasanya dilakukan dengan ancaman bunuh, ancaman membuat cacat anggota tubuh atau pemukulan sadis yang dikhawatirkan membahayakan jiwa, membikin cacat atau melenyapkan seluruh harta.

Adapun intimidasi non fungsional adalah intimidasi yang merusak kerelaan namun tidak merusak hak pilih dan ini bisa dengan ancaman yang lebih rendah dari ancaman yang digunakan di atas seperti ancaman dengan pukulan yang tidak membinasakan jiwa atau anggota badan atau ancaman dengan dilenyapkan sebagian harta.

Adapun apabila gangguan itu ringan dan tidak perlu dipedulikan, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali, bahkan tidak dianggap sebagai intimidasi sama sekali. Barometer untuk membedakan antara gangguan yang tidak perlu dipedulikan dengan gangguan yang akan meningkat menjadi intimidasi adalah keputusan hakim. Karena tidak ada batasan yang tidak bisa dikurangi atau dilebihi. Sementara membuat batasan dengan akal, jelas tidak mungkin, maka keputusannya dikembalikan kepada hakim, karena bisa berbeda-beda tergantung pula dengan kondisi manusia. Ada orang yang tidak merasa terancam kecuali bila dipukul dengan keras atau dipenjara dalam waktu lama. Namun ada yang merasa terancam hanya dengan gertakan.

Para ahli fikih telah bersepakat bahwa berbagai kegiatan ekonomi yang didasari oleh suka sama suka, seperti jual beli dan sejenisnya tidak dianggap sah bila dilakukan di bawah intimidasi. Namun apakah semua kegiatan itu dibolehkan setelah hilangnya intimidasi atau tidak? Yakni apabila muncul kerelaan setelah sebelumnya diintimidasi, apakah bisa dibenarkan atau tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan alim ulama. Mayoritas ulama melarangnya, sementara Abu Hanifah membolehkannya.

**Kedua: Kekeliruan**

Cacat ini berkaitan dengan objek akad usaha tertentu. Yakni dengan menggambarkan objek akad dengan satu gambaran tertentu, tapi ternyata yang tampak justru kebalikannya, seperti orang yang membeli perhiasan berlian, tapi ternyata dibuat dari kaca, atau orang yang membeli pakaian dari sutera, tapi ternyata hanya dibuat dari katun.

Tidak diragukan lagi bahwa kekeliruan semacam ini tentu raja akan mempengaruhi keridhaan, karena faktor perbedaan antara kenyataan dengan hal yang diperkirakan sebelumnya yang seharusnya disenanginya. Bahkan bisa jadi urusannya akan berkembang sehingga akad menjadi gagal total karena objek perjanjian yang hilang. Seperti dua orang yang melakukan perjanjian dalam jual beli emas, ternyata pembeli mendapatkan barang beliannya hanya berupa tembaga. Karena objek akad, yakni emas, tidak ada, maka akad jual beli tersebut batal karena objek akad hilang dari perjanjian.

Kekeliruan itu sendiri ada dua macam:

1. Kekeliruan yang menyebabkan batalnya akad. Yaitu kekeliruan yang disebabkan oleh terjadinya perbedaan jenis objek yang disebutkan dalam akad dengan yang diserahterimakan, atau terjadinya perbedaan yang jauh antara kualitas barang seperti antara emas dengan logam kuningan, atau antara daging sembelihan dengan daging bangkai.
2. Kekeliruan yang bukan pada perbedaan jenis atau perbedaan kualitas barang yang menyolok, seperti orang yang membeli hewan jantan, ternyata hewannya betina, atau sebaliknya. Kekeliruan ini tidaklah membatalkan akad tersebut, akan tetapi pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkannya.

**Ketiga: *Ghabn* (Penipuan Harga Barang)**

*Ghabn* dari segi bahasa bermakna kurang.

Dan dalam terminologi (istilah) fikih, *ghabn* ialah kekurangan pada salah satu kompensasi transaksi (barang dan harga), atau terjadinya ketidakadilan dalam salah satu barang transaksi barter karena ketidaksetaraan antara yang diberikan dengan yang diterima\_ seperti orang yang menjual rumah seharga sepuluh juta padahal harganya hanya delapan juta. Dari pihak orang yang melakukan penyamaran harga, berarti memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi lebih dari harga barang. Sementara dari pihak yang menjadi korban penyamaran harga barang, memiliki barang dengan harga lebih mahal dari harga barang sebenarnya.

Penipuan harga barang itu sendiri menurut kalangan ahli fikih ada dua macam, yaitu penyamaran berat dan penyamaran ringan.

**Penipuan ringan,** yakni penyamaran pada harga barang yang tidak sampai mengeluarkannya dari harga pasaran, yakni harga yang diperkirakan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan. Kegiatan pasar hampir tidak bisa diselamatkan dari jenis penyamaran harga ringan semacam ini. Dalam semua jenis akad usaha, penyamaran harga barang semacam itu dapat dimaklumi, dan tidak ada pengaruh apa-apa.

**Penyamaran berat,** yakni yang sampai mengeluarkan barang dari harga pasarannya. Penipuan harga barang semacam ini tentu saja membatalkan perjanjian yang subjeknya adalah sebagai harta wakaf atau harta orang yang dicekal, atau harta Baitul Mal, karena pengoperasian harta-harta semacam ini harus berada dalam lingkaran kemaslahatan harta tersebut.

Adapun dalam perjanjian-perjanjian usaha lain, masih diperselisihkan pengaruh penipuan berat ini terhadapnya. Ada tiga pendapat yang populer:

1. Penipuan harga semacam itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, demi menjaga kepentingan berlangsungnya akad yang dilakukan dan menjaganya agar tidak batal. Karena orang yang menjadi korban penipuan harga barang itu tidak lepas dari sikap teledor dan terburu-buru. Untuk itu, ia juga harus menanggung akibat perbua tannya itu.

2. Orang yang menjadi korban penipuan harga barang itu berhak membatalkan akad, untuk melepaskan sikap semena-mena terhadap dirinya.

3. Penipuan harga barang ini bisa dimasukkan hitungan bila tujuannya adalah penipuan dari satu pihak, pihak yang menjadi korban berhak membatalkannya. Kalau tidak dengan niat menipu pembeli, maka tidak ada pengaruh apa-apa. Kemungkinan inilah pendapat yang paling pas dari semua pendapat di atas. *WaHalm A"lam.*

Barometer pembedaan antaran penipuan ringan dengan berat adalah adat kebiasaan. Karena tidak ada batasan paten dalam persoalan ini. Adapun berbagai riwayat tentang perkiraan batasan penvamaran harga yang diambil dari sebagian ahli fikih tidak dianggap sebagai ajaran syariat yang permanen. Namun semua itu didasari oleh adat kebiasaan yang tersebar pada masing-masing zaman mereka.

**Memperhatikan Kondisi Darurat**

Setelah akad berjalan aman, dalam sebuah perjanjian yang pelaksanaannya membutuhkan waktu panjang, bisa saja situasi dan kondisi berubah secara total, sehingga pelaksanaan komitmen yang menjadi tanggung jawab salah satu pihak sesuai akad usaha yang menimbulkan berbagai pengaruh yang amat membahayakan dirinva. Seperti naiknya harga mata uang secara drastis. Atau naiknya harga bahan-bahan material secara tiba-tiba pula dalam sebuah akad kontrak (membuat bangunan), dan sejenisnya. Lalu bagaimana sikap fikih Islam terhadap persoalan ini?

Sesungguhnya dasar-dasar ajaran syariat membolehkan penerapan pengubahan komitmen demi menciptakan keadilan. Sehingga beban kerugian karena perubahan situasi dan kondisi ini dipikul bersama oleh kedua pihak yang terikat perjanjian tersebut.

Persoalan ini pernah disampaikan kepada *Majma' al-Filth alIslami* (Majelis Fikih Islam) pada musyawarah kelima tahun 1402 H. Mereka mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

1. Dalam berbagai akad yang pelaksanaannya membutuhkan waktu lama, seperti perjanjian usaha ekspor-impor, perjanjian usaha jasa pemeliharaan, pemborongan bangunan dan seje nisnya, bila terjadi perubahan kondisi saat pelaksanaan perjanjian usaha tersebut, yang menjadikan situasi, biaya dan harga berubah dengan drastis karena sebab-sebab mendadak yang tidak diduga sebelumnya pada saat akad, sehingga untuk melaksanakan berbagai komitmennya salah satu pihak akan mengalami kerugian besar yang tidak wajar karena perubahan harga di dunia bisnis, namun bukan karena faktor keteledoran atau kelengahan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam menjalankan komitmennya, maka dalam kondisi demikian persoalan tersebut dikembalikan kepada hakim bila terjadi perselisihan. Dan sesuai dengan tuntutan keadaan, maka berbagai hak dan kewajiban diubah dengan konsekuensi bahwa segala kerugian karena ketidaksesuaian harga dengan perjanjian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Demikian juga pihak yang dirugikan berhak membatalkan perjanjian yang belum dilaksanakan, kalau is menganggap bahwa pembatalan perjanjian itu lebih balk dan lebih memudahkan permasalahan yang dihadapinya, tentunya dengan ganti rugi dari pihak yang bermasalah itu kepada pihak yang berhak terhadap hasil perjanjian. Sehingga dengan kompensasi itu dapat ditutupi bagian kerugian yang masuk akal untuk ditutupi sesuai akad, sehingga tercipta keadilan bagi kedua belah pihak tanpa menghancurkan pihak yang dirugikan. Dalam memberi berbagai pertimbangan tersebut seorang hakim bisa meminta pertimbangan para pakar perniagaan yang bisa dipercaya.

**2.** Hakim juga berhak memberikan tenggang kepada pemborong bila is melihat bahwa kondisi tiba-tiba itu masih bisa berubah kembali dalam waktu dekat, dan pemesan tidak mengalami kerugian berarti dengan penangguhannya itu.

Demikianlah, dan al-Majma' al-Fiqh al-Islami (Majelis Ulama Fikih) tersebut berpandangan bahwa solusi yang bersandarkan dasar-dasar syariat ini dapat merealisasikan keadilan yang diwajibkan pada dua pihak yang melakukan akad, dan dalam upaya menghindari bahaya yang akan dialami salah satu pihak karena satu sebab yang tidak ada campur tangan darinya. Solusi ini lebih menyerupai fikih syariat yang bijaksana dan lebih mendekati kaidah-kaidah syariat serta tujuan-tujuan umum dari ajaran syariat dan keadilan.

**Asal Segala Akad dan Persyaratan adalah Mubah**

Asal dari segala bentuk akad dan persyaratan adalah mubah, menurut pendapat ulama yang paling benar,[[8]](#footnote-7) sehingga tidak ada Yang diharamkan kecuali yang diindikasikan keharamannya oleh ajaran Islam, dengan dalil tegas atau kias.

Di antara dalil-dalil mereka yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

Asal dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak. Konsekuensinya adalah komitmen yang mereka sepakati bersama untuk mereka. Allah it berfirman,

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."* (An-Nisa': 29).

Allah mengecualikan harta yang diambil dari orang lain dengan saling ridha dari harta-harta yang diharamkan. Yang dipersvaratkan dalam jual beli di dalam ayat ini hanya saling ridha alias Atka sama suka, sebagaimana kerelaan hati menjadi syarat berinfak. Itu menunjukkan bahwa segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali kalau terbukti ajaran syariat mengharamkannya, seperti jual beli minum-an keras.

Akad dan persyaratan termasuk soal adat kebiasaan, dan asalnya adalah tidak diharamkan, karena asal dari adat kebiasaan adalah mubah. Allah bersabda,

*padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."* (A1-An'am: 119).

Hukum ini berlaku umum untuk benda dan perbuatan. Hukumnya dijadikan sebagai standar hukum asal hingga ada penjelasan tentang keharamannya.

Nash atau dalil-dalil tegas yang melarang berbagai bentuk aktivitas amat sedikit sekali. Itu menunjukkan bahwa selain yang disebutkan keharamannya, tetap dalam hukum asal, yakni mubah. Ibnul Arabi menyatakan, "Ada empat kategori nash yang menjadi kaidah aktivitas mu'amalat dalam Islam:

1. Ayat tentang keharusan saling ridha di antara kedua pihak (yang melakukan akad atau transaksi).[[9]](#footnote-8)
2. Firman Allah *"Dan Allah menghalalkan jual beli."* (Al-Baqarah: 275).
3. Hadits-hadits tentang larangan jual beli *gharar* (manipulasi).
4. Menjadikan tujuan-tujuan luhur Syariat Islam sebagai dasar.

Akad-akad berbagai aktivitas yang berbeda-beda, sPerti jual beli, penyewaan, hibah dan sejenisnya, tidak diberi batasan khusus dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul. Tidak ada juga riwayat yang dinukil dari para ulama as-Salaf bahwa semua perjanjian itu adalah sebentiik materi dengan kriteria tertentu. Sementara semua hal yang bersifat umum tak terikat satu kriteria batasannya, semua dikembalikan kepada adat kebiasaan, yang dianggap masyarakat sebagai jual beli atau penyewaan, dianggap sebagai jual beli dan penyewaan, meskipun mereka menyebutkan dengan istilah dan ungkapan lain.

Namun kalangan azh-Zhahiriyah berpendapat lain. Mereka menyatakan, Tidak ada akad dan persyaratan yang dibolehkan, kecuali yang ditunjukkan oleh nash dari Kitabullah dan Sunnah Rasul. Mereka beralasan dengan sabda Nabi *"Barangsiapa yang melakukan satu amalan yang tidak didasari oleh agama kami, maka amalannya itu tertolak."[[10]](#footnote-9)*

Demikian juga dengan sabda Nabi

*"Setiap persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah maka persyaratan itu batal, meskipun seratus persyaratan.* "[[11]](#footnote-10)

Hadits pertama dapat disangkal, bahwa yang dimaksud dalam hadits itu sebagai amalan adalah ibadah. Dan sudah disepakati bahwa ibadah itu adalah tauqifiyah. Sementara alasan dengan hadits kedua dapat disangkal bahwa yang dimaksud dengan persyaratan di situ adalah persyaratan yang bertentangan dengan ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasul. Batalnya bentuk persyaratan semacam itu juga sudah menjadi kesepakatan. Namun tidaklah secara aksiomatik terindikasikan bahwa merupakan hal yang wajib bila setiap persyaratan itu harus disyariatkan secara khusus dengan dalil praktis secara langsung dari Kitabullah dan Sunnah Rasul.

**(Syarat Sanksi dalam Akad)**

Hal yang populer dalam berbagai perjanjian pemborongan bangunan dan ekspor-impor modern adalah adanya syarat sanksi atau pemberian denda yang ditujukan kepada seorang pemborong atau eksportir dengan diharuskan menyelesaikan kewajiban usaha jasanya selama masa tertentu, lalu dikenakan denda ketika is terlambat dari waktu yang disepakati. Sebenarnya sejauh mana sistem ini disyariatkan?

Orang yang memperhatikan dengan seksama persoalan ini pasti akan mendapatkan bahwa aturan itu adalah demi kepentingan perjanjian itu sendiri. Karena cara itu dapat mendorong agar perjanjian berjalan mulus pada waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, secara teoritis persyaratan semacam itu dapat dibenarkan, selama tidak ada alasan yang diterima syariat. Namun kalau ada unsur berlebih-lebihan dalam pemberian denda, semuanya harus dikembalikan kepada sikap adil dan arif. Dalam menentukan jumlah dendanya hendaknya dikembalikan kepada keputusan para pakar hukum dan para ulama.

*Majelis Kibar al-Ulama'* (Majelis Ulama Besar) di Saudi Arabia telah membahas problematika syarat sanksi tersebut, dan pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa syarat itu sah dan bisa diterapkan, namun jumlah denda yang ditentukan hendaknya didasari oleh sikap adil dan arif. Berikut ini ketetapan dari Lembaga Ulama Besar tersebut:

**Keputusan Majelis Ulama Besar Seputar Syarat   
Sanksi:**

"Keputusan ini kami ambil, setelah tukar menukar pendapat, mendiskusikan dan mengeluarkan segala persoalan yang ada yang bisa dijadikan sebagai analogi dari syarat sanksi tersebut, lalu diadakan diskusi untuk mengalamatkan berbagai analogi tersebut kepada permasalahan-permasalahan itu, serta mempelajari Firman Allah ‘k,

*"Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan/ah akad-akad kallan."*

Dan hadits Rasulullah

*"Kaum Muslimin terikat oleh persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal,"*

Juga ucapan Umar

*"Dasar-dasar memutuskan hak-hak adalah pada persyaratannya,"*

serta bersandar pada pendapat yang benar bahwa "asal dari semua persyaratan adalah sah," yakni bahwa tidak ada yang ha- ram dan batal kecuali yang diindikasikan oleh syariat batal atau haram dengan nash (dalil) tegas, atau kias."

Di sini akan kami bawakan apa yang telah disebutkan oleh para ulama tentang pembagian syarat dalam perjanjian menjadi syarat sah dan syarat rusak atau batal, dan bahwa syarat yang sah juga terbagi menjadi tiga:

*Pertama,* syarat yang menjadi konsekuensi akad, seperti syarat harus ada serah terima barang dan penyerahan pembayaran.

*Kedua,* syarat demi kepentingan akad, seperti syarat bentuk pembayaran, seperi pembayaran tertunda atau penggadaian, atau dengan jaminan orang. Seperti juga bentuk barang, seperti misalnya keberadaan budak harus masih perawan.

*Ketiga,* syarat yang jelas kegunaannya namun bukan merupakan konsekuensi akad, dan juga bukan demi kepentingan akad tersebut, namun juga tidak bertentangan dengan konsekuensi akad itu. Seperti seorang penjual rumah yang meminta persyaratan untuk tetap tinggal di rumah itu selama satu bulan.

Sementara persyaratan rusak pun terbagi menjadi tiga:

*Pertama,* persyaratan dari salah satu pihak yang terkait dalam akad terhadap pihak lain untuk melakukan satu akad jual bell lain, penyewaan lain dan sejenisnya.

*Kedua,* persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Seperti persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau agar tidak dijual lagi, diberikan, atau (bila budak) dibebaskan.

*Ketiga,* persyaratan yang membuat perjanjian menjadi tergantung. Seperti ucapan, "Aku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang."

Dengan demikian dapat diterapkan syarat sanksi, dan tampak jelas bahwa syarat itu termasuk demi kepentingan perjanjian usaha. Karena is dapat mendorong agar perjanjian itu dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.

Bisa juga dijadikan dalil penenang, apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shafillnya* dengan sanad beliau sendiri dari Ibnu Sirin, bahwa ada seorang lelaki berkata kepada orang sewaan, "Masukkanlah kendaraanmu. Kalau pada hari ini aku tidak pergi bersamamu, maka engkau kuberi seratus dirham." Ternyata pada hari tersebut is tidak pergi. Maka Hakim Syuraih berkata, "Barangsiapa yang menetapkan syarat atas dirinya sendiri dengan kesadaran tanpa ada yang memaksa, maka syarat itu menjadi kewajiban dirinya.."

Ayyub meriwayatkan dari Ibnu Sirin, ada seorang lelaki yang menjual makanan, is berkata, "Kalau pada hari Rabu aku tidak menemuimu, maka tidak ada jual beli antara kita." Ternyata lelaki itu tidak datang pada hari tersebut. Maka Syuraih berkata kepada pembelinya, "Anda menyalahi janji." Beliau menetapkan denda atasnya.

Lebih daripada itu, hal tersebut berarti mengkonfrontasikan antara sikap merusak transaksi dengan menjaga komitmen terhadap perjanjian. Karena merusak transaksi disinyalir menimbulkan mudarat dan menghilangkan banyak manfaat. Dengan membenarkan adanya sanksi hukum tersebut akan tertutup pintu terjadinya kekacauan atau mempermainkan hukum-hukum Allah, bahkan termasuk sebab pengingkaran terhadap pemenuhan janji, selain juga demi merealisasikan Firman Allah,

*"Wahai orang-orang yang beninan, tunaikanlah aleadakad kalian."(Al-Ma'* idah: 1).

Dengan semua alasan itu, Majelis Ulama Besar (Saudi Arabia) menetapkan secara aklamasi bahwa syarat sanksi hukum yang diberlakukan dalam berbagai akad itu adalah syarat sah dan diakui kebenarannya, selama (yang melakukan kesalahan) tidak memiliki alasan yang dibenarkan syariat ketika is menyalahi komitmen terhadap transaksi. Bila terhadap alasan yang dibenarkan syariat, maka sanksi itu tidak berlaku hingga alasan itu tidak ada lagi.

Kalau syarat sanksi itu banyak sekali jumlahnya sesuai kebiasaan yang ada sehingga tujuannya adalah ancaman finansial, tidak lagi sejalan dengan konsekuensi kaidah-kaidah syarat, maka harus dikembalikan kepada sikap adil dan bijaksana sesuai de ngan manfaat yang hilang atau kerusakan yang ditimbulkan. Kalau terjadi perselisihan, dikembalikan kepada hakim yang syar'i melalui musyawarah dengan para pakar hukum dan ulama, demi mengamalkan Firman Allah,

*"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adll."* (An-Nisa.: 58).

Demikian juga dengan Firman Allah '

*"Dan janganlah sekali-kall kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak add. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* (AIMa idah: 8).

Juga demi mengamalkan sabda Nabi

*"Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan."[[12]](#footnote-11)*

Semoga Allah memberikan taufikNya, dan semoga shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya terlimpahkan kepada Nabi Muhammad \*, kepada sanak saudara dan kepada para Sahabat beliau.

**KESIMPULAN**

Akad adalah keterikatan keinginan dengan pihak lain dengan cara yang membutuhkan komitmen yang disyariatkan.

**Rukun-rukun Perjanjian**

**Pertama,** pihak-pihak yang melakukan akad. Pihak-pihak yang melakukan akad tersebut disyaratkan memiliki kompetensi (kelayakan) dalam bertindak, baik itu kesempurnaan masa berpikir dan kemampuan memilih. Sementara keberlangsungan perjanjian secara permanen membutuhkan tidak adanya berbagai macam hak pilih tertentu, seperti hak pilih persyaratan dan sejenisnya.

**Kedua,** objek akad. Syaratnya harus suci dan fungsional, bisa diserahterimakan, hak milik penuh dari pihak yang melakukan perjanjian, diketahui secara jelas sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan sedikit pun dan bisa menyelamatkan perjanjian usaha itu dari konflik.

**Ketiga,** pelafazhan perjanjian (shighat akad). yaitu, pengungkapan oleh pihak-pihak yang terkait terhadap keinginannya yang mengesankan terlaksananya perjanjian. Pelafazhan itu terdiri dari *ijab* dan *qabul. Ijab* adalah yang diucapkan pertama kali dan menunjukkan pemindahan kepemilikan. *Qabul* adalah yang diucapkan sesudah *ijab* dan menunjukkan penerimaan kepemilikan.

Para ulama bersepakat bahwa perjanjian itu terlaksana dengan pelafazhan perjanjian tersebut. Namun mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu terlaksana hanya dengan serah terima barang, yakni hanya dengan perbuatan tanpa ucapan. Namun yang benar adalah pendapat yang menyatakan itu sah.

Dalam melafazhkan perjanjian (shighat akad) itu disyaratkan berlangsung pada satu (majelis). Kemudian *ijab* itu tetap tidak mengalami perubahan hingga datang *qabul* dari pihak lain, serta tidak muncul sikap menolak atau sikap tidak menerima dari pihak yang lain.

Kompetensi adalah kelayakan seseorang dalam menciptakan atau menerima kewajiban, yakni untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Kelayakan tersebut ada dua macam: kelayakan wajib dan kelayakan melaksanakan hak dan kewajiban. Keduanya ada yang bersifat penuh dan ada yang bersifat tidak penuh. Sehingga klafisikasinya menjadi empat :

**1. Kompetensi wajib yang penuh,** yakni kelayakan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Kelayakan ini dimiliki oleh seseorang dari semenjak dia lahir hingga is meninggalkan dunia

**2. Kompetensi wajib yang tidak penuh,** yakni kelayakan seseorang untuk menerima haknya saja. Kelayakan ini sudah dimiliki oleh janin ketika masih menempel di dinding rahim hingga dilahirkan.

**3. Kompetensi Pelaksanaan Penuh,** yakni kompetensi sempuma melakukan aktivitas, yakni aktivitas yang dilakukan manusia sesuai dengan cara yang disyariatkan. Tentunya ini hanya bisa dilakukan dalam masa akil baligh sempurna dan adanya kebebasan memilih.

**4. Kompetensi Pelaksanaan Tidak Penuh.** Yakni kelayakan seseorang, melakukan sebagian aktivitas saja. Barometernya adalah masa *mumayyiz.* Kompetensi ini terus berkembang hingga masa akil baligh sempurna. Kalau sudah sempurna masa akil balighnya, maka telah sempurna kelayakannya.

Sementara aktivitas anak kecil yang sudah *mumayyiz* juga terbagi menjadi tiga:

**Pertama,** yang dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Yakni aktivitas yang murni bermanfaat, seperti menerima hibah.

**Kedua,** yang dianggap tidak sah, juga menurut kesepakatan Yakni yang murni mengandung mudarat, seperti memberikan hibah, meminjamkan uang dan sejenisnya.

**Ketiga,** yang tergantung pada pendapat walinya. Yakni yang :erkadang bermanfaat namun terkadang mudarat. Seperti jual beli **dan** sejenisnya.

Lelaki dan wanita memiliki kelayakan yang sama (kecuali bila disebutkan perbedaannya oleh Allah dan RasulNya, pent.), dan ha**nva** dikecualikan dalam dua hal:

**Pertama,** kelayakan wanita dalam melakukan akad nikah (menadi nikah). Perbuatan ini dinyatakan terlarang bagi wanita oleh mayoritas ulama, namun kalangan Hanafiyah membolehkannya.

**Kedua,** kelayakan wanita memberikan infak yang lebih dari sepertiga hartanya tanpa izin suami. Perbuatan ini juga dilarang bagi wanita menurut mayoritas ulama, kecuali Imam Malik yang membolehkannya.

**Penghalang-penghalang Kompetensi (Kelayakan)**

Yakni berbagai hal yang menimpa seseorang sehingga menghilangkan kompetensinya atau menguranginya serta merubah sebagian hukum yang berkaitan dengan kompetensi tersebut.

Penghalang-penghalang itu terbagi menjadi dua:

**Pertama,** penghalang-penghalang dari Allah. Yakni, yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, seperti munculnya penyakit gila, pingsan, sifat idiot dan tidur. Semua kendala ini menggugurkan kelayakan yang ada, dan berarti juga menggugurkan seluruh aktivitas sehingga menjadi pekerjaan sia-sia yang tidak membawa pengaruh apa-apa. Namun hal ini tidaklah bertentangan dengan wajibnya zakat dalam hartanya, tanggung jawab yang dia pikul bila merusak barang orang lain. Karena hal itu berkaitan dengan hukum sebab akibat. Namun tanggung jawab itu dialamatkan kepada walinya.

**Kedua,** penghalang-penghalang yang berasal dari manusia itu sendiri. Yakni yang manusianya juga memiliki andil untuk mewujudkannya. Seperti mabuk, ketidaktahuan, hutang, sakit yang membawa pada kematian.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mabuk yang diharamkan itu tidak menggugurkan kelayakan dan tidak menggugurkan beban hukum. Namun kalangan Malikiyah berpendapat lain, dalam riwayat yang populer dari mereka, demikian juga Ibnu Taimiyah.

Adapun orang pandir dan orang yang dicekal karena hutang misalnya, seluruh aktivitasnya disamakan dengan aktivitas anak kecil yang *mumayyiz.*

**Berbagai Macam Hak Pilih (Khiyar) dalam Akad**

Hak pilih (khiyar) dimiliki oleh setiap pihak yang terikat akad dalam memilih di antara dua hal yang terbaik: melanjutkan perjanjian atau membatalkannya. Disyariatkan untuk membuktikan dan mempertegas keridhaan masing-masing pihak.

Hak pilih itu sendiri ada bermacam-macam, di antaranya:

**Pertama,** hak pilih berdasarkan tempat-tempat akad *(Khiyar Majelis).* Yakni hak masing-masing pihak untuk membatalkan perjanjiannya atau melanjutkannya selama masih di tempat akad.

**Kedua,** hak pilih berdasarkan persyaratan *(Khiyar asy-Syarth).* Yakni hak masing-masing pihak bagi dirinya sendiri atau bagi pihak lain untuk membatalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.

**Ketiga,** hak pilih melihat *(Khiyar ar-Ru'yah).* Yakni hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan akad pada objek tertentu yang belum is lihat untuk membatalkannya bila telah melihat objek tersebut.

**Keempat,** hak pilih bila terdapat cacat pada objek akad *(Khi- war 'Aib).* Yakni hak pilih untuk membatalkan akad bila tersingkap adanya cacat pada objek perjanjian.

**Cacat dalam Akad**

Pelaksanaan terhadap perjanjian usaha terkadang menemui berbagai cacat yang bisa menghilangkan keridhaan satu pihak, atau membuat cacat objek perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa membatalkan perjanjian tersebut. Di antara cacat-cacat itu adalah:

**1. Intimidasi**

Yakni memaksa pihak lain terhadap ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya, melalui gertakan dan ancaman.

Intimidasi ini ada dua macam: Intimidasi fungsional, yakni yang dapat merusak keridhaan dan hak pilih. Biasanya dilakukan dengan ancaman bunuh, membikin cacat anggota tubuh atau merampas seluruh harta pihak yang diintimidasi.

Intimidasi non fungsional. Yakni intimidasi yang tidak menghilangkan keridhaan, dan tidak merusak hak pilih, biasanya dilakukan dengan ancaman pukul atau merampas sebagian harta pihak yang diintimidasi.

Para ulama telah bersepakat bahwa segala bentuk aktivitas finansial tidak bisa berlaku di bawah intimidasi. Namun mereka berUeda pendapat bila ternyata pihak yang diintimidasi merasa rela, setelah tidak diintimidasi lagi.

**2. Kekeliruan**

Yakni kekeliruan yang berkaitan dengan objek akad. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata yang didapatinya perhiasan terbuat dari kaca.

Kekeliruan itu sendiri terbagi menjadi dua:

**a)** Kekeliruan yang membatalkan akad, yakni bila terjadi perbedaan jenis atau kualitas objek akad secara signifikan. Seperti perbedaan antara emas dengan tembaga, atau antara bangkai dengan hewan sembelihan yang sudah berupa daging.

**b)Kekeliruan** yang tidak sampai membatalkan akad, akan tetapi pihak yang dirugikan tetap diberi hak untuk membatalkan akad itu. Yakni ketika terjadi perbedaan yang bukan pada jenis atau fasilitas objek secara signifikan. Seperti orang yang membeli hewan dengan dugaan jantan, ternyata betina.

3. **Manipulasi Harga** *(al-Ghabn)*

Yakni terjadinya kekurangan pada salah satu barang barter atau kompensasi, atau terjadinya tukar menukar yang tidak adil (dan diketahui salah satu pihak). Manipulasi harga itu sendiri ada dua macam:

**Manipulasi ringan.** Yakni yang tidak menyebabkan objek akad keluar dari harga pasaran dengan perkiraan harga para pakar perniagaan. Penyamaran ringan semacam ini dapat dimaklumi, bahkan hampir tidak ada jual beli yang selamat dari penyamaran semacam ini, sehingga tidak berpengaruh sama sekali.

Yang kedua adalah **manipulasi berat** yang sampai mengeluarkan barang perjanjian dari harga pasaran. Mengenai pengaruhnya terhadap perjanjian usaha, ada tiga pendapat di kalangan para ulama:

**a)** Tidak perlu dipedulikan sama sekali, demi menjaga kemaslahatan berlangsungnya akad.

b)Atau menganggapnya dapat membatalkan perjanjian secara mutlak, demi menjaga pihak yang dirugikan agar tidak mendapatkan perlakuan semena-mena.

c) Atau dilihat dahulu, kalau dengan tujuan menipu (yakni disengaja), dapat membatalkan akad. Namun bila tidak bertujuan demikian, maka tidak berpengaruh apa-apa. Kemungkinan pendapat terakhir ini adalah yang paling tepat.

Semua rincian tersebut tidak berlaku bagi harta-harta wakaf dan harta orang bangkrut dan terlilit hutang serta harta Baitul Mal. Karena dalam semua harta tersebut, semua bentuk kamuflase harga tidak membatalkan perjanjiannya. Karena pengoperasian hartaharta tersebut harus berputar dalam kepentingan harta itu sendiri.

**Memperhatikan Kondisi Darurat (Mendadak)**

Apabila terjadi perubahan kondisi mendadak pada masa terjadinya akad secara drastis, seperti kenaikan nilai mata uang, kenaikan bahan-bahan pokok, sehingga pelaksanaan akad tersebut sesuai perjanjian dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang menjaga komitmen yang harus ia tanggung, maka pihak hakim boleh merubah hak-hak dan komitmen bila terjadi konflik, sehingga kerugian ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak. Pihak pelaksana perjanjian juga berhak membatalkan perjanjian yang masih berlangsung kalau ia melihat lebih baik untuk dibatalkan saja, tentunya dengan memberikan kompensasi seimbang kepada pihak yang memiliki akad. Pihak hakim juga boleh membiarkan pelaksana untuk meneruskan pelaksanaannya kalau ia melihat itu lebih baik demi kemaslahatan pihak-pihak yang terikat dalam akad tersebut.

**Asal dari Akad dan Syarat adalah Mubah**

Sehingga yang diharamkan adalah yang diindikasikan keharamannya oleh syariat atau kias.

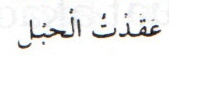
**Persyaratan Sanksi Hukuman**

Persyaratan sanksi hukuman yang berlaku dalam berbagai perjanjian usaha sekarang ini dianggap sah dan diakui, bahkan harus diterapkan selama pihak yang bersalah tidak memiliki alasan yang diterima syariat dalam melanggar komitmen. Sehingga alasannya ini dapat menggugurkan sanksi hukuman tersebut.

Namun apabila persyaratan sanksi hukuman itu banyak sekali menurut kebiasaan, sehingga tujuannya adalah ancaman keuangan, jauh dari kode etik syariat, urusannya harus dikembalikan kepada sikap adil dan bijaksana sesuai dengan manfaat atau bahaya yang timbul karenanya.

1. Ikatan itu sendiri bisa berarti konkrit, dan itulah arti sebenarnya. Seperti dikatakan dalam bahasa Arab:

   (saya mengikatkan tali), yakni saya ikat dan saya hubungkan antara dua ujungnya. Namun Ikatan tersebut juga bisa memiliki pengertian abstrak seperti ikatan jual bell misalnya. Dapat digunakan juga untuk hal yang diharuskan seseorang bagi dirinya sendiri seperti satu pekerjaan tertentu di masa mendatang. Seperti mengikat tekad pada diri sendiri untuk harus berhaji pada tahun ini.

   [↑](#footnote-ref-0)
2. Yang perlu diingat di sini, bahwa satu barang dikatakan bermanfaat atau tidak, itu bisa berubah melalui perkembangan zaman. Sampah misalnya, dahulu dianggap sebagai barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Namun dalam kehidupan modern kita sekarang ini, sampah dapat digunakan dalam produksi pupuk dan sejenisnya. Maka komoditi ini tidak lagi dianggap sebagai barang rongsokan. [↑](#footnote-ref-1)
3. Pengecualian jual beli *sharf* dan *sa/am* masih perlu dikaji ulang. Karena semua media yang memungkinkan   
   diberlangsungkannya transaksi dengan cara seperti itu juga bisa memberikan harga modal di muka dalam   
   lokasi tran-ansaksi seperti pada jual beli *salam,* yakni dengan mentransfernya secara langsung ke rekening   
   penjual rnelalui Internet. Pemberian barang secara langsung juga dapat dilakukan seperti dalam jual beli *Sharf.* [↑](#footnote-ref-2)
4. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 495; at-Tirmizi, no. 464; ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar,* no. 2565; serta al-Hakim 1/201; serta yang lainnya. At-Tirmidzi menyatakan, "Hadist ini hasan shahih." Al-Hakim menyatakan, "Shahih berdasarkan persyaratan Muslim." [↑](#footnote-ref-3)
5. !'lam al-Muwaqqi’in, 3/106. [↑](#footnote-ref-4)
6. Telah *ditakhrij* sebelumnya. [↑](#footnote-ref-5)
7. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab al-Buyu; Bab Ma Yukrahu min al-Khida' fi al-Bai' ,* no. 2117; dalam *Kitab al-Hiyal,* no. 4964; dan Muslim dalam *Kitab al-Buyu; Bab Man Yukhda'u fi al-Bar ,* no. 1533\_ [↑](#footnote-ref-6)
8. jurnhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Namun asal dari pers-yaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu hares diikat dengan nash-nash atau kesimpulan dari nash berdasarkan ijtihad. Kalangan Hanbaliyah dan Ibnu Syubrumah seta sebagian kalangan Malikiyah berpendapat lain. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan bebas. [↑](#footnote-ref-7)
9. Sepertinya, yang dimasksud oleh penulis adalah Firman Allah,

   *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sating memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(An-Nisa‘* : 29), Ed. [↑](#footnote-ref-8)
10. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1718. [↑](#footnote-ref-9)
11. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2735; dan Muslim, no. 1504. [↑](#footnote-ref-10)
12. Telah di *Takhrij* sebelumnya. [↑](#footnote-ref-11)